

**RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN 2010-2014**

**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
2011**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses rencana yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program yang realistis selama periode 2010-2014.

Renstra Sekretariat Jenderal ini mengacu dan sejalan dengan dokumen Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan masing-masing Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal menyusun Renstra di tingkat Eselon II.

Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2010-2014 ini dalam implementasi setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal dalam kurun waktu 2010-2014. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.

Jakarta, 2011
Sekretaris Jenderal

Hari Priyono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI..	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL.....	2
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL	5
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perencanaan	5
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian	5
1.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum dan Informasi Publik	6
1.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Biro Keuangan dan Perlengkapan	6
1.3.5 Tugas Pokok dan Fungsi Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	7
1.3.6 Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kerjasama Luar Negeri	7
1.3.7 Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	8
1.3.8 Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.....	8

1.4	URAIAN TUGAS SEKRETARIAT JENDERAL	9
1.4.1	Uraian Tugas Biro Perencanaan	10
1.4.2	Uraian Tugas Biro Organisasi dan Kepegawaian	11
1.4.3	Uraian Tugas Biro Hukum dan Informasi Publik	12
1.4.4	Uraian Tugas Biro Keuangan dan Perlengkapan	12
1.4.5	Uraian Tugas Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	14
1.4.6	Uraian Tugas Pusat Kerjasama Luar Negeri	15
1.4.7	Uraian Tugas Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	16
1.4.8	Uraian Tugas Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	16
1.5	CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL	17
1.5.1	Capaian Kinerja Perencanaan	20
1.5.2	Capaian Kinerja Organisasi dan Kepegawaian	21
1.5.3	Capaian Kinerja Hukum dan Informasi Publik	22
1.5.4	Capaian Kinerja Keuangan dan Perlengkapan	23
1.5.5	Capaian Kinerja Kerjasama Luar Negeri	24
1.5.6	Capaian Kinerja Data dan Sistem Informasi Pertanian	25
1.5.7	Capaian Kinerja Perlindungan Varietas Tanaman	26
1.5.8	Capaian Kinerja Pelayanan, Perizinan dan Investasi.....	26
II.	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PEMBIAYAAN 2010-2014.....	28
2.1	VISI KEMENTERIAN PERTANIAN.....	28
2.2	VISI SEKRETARIAT JENDERAL	28

2.3	MISI SEKRETARIAT JENDERAL.....	28
2.4	TUJUAN.....	29
2.5	SASARAN.....	30
2.4.1	Sasaran Program	30
2.4.2	Sasaran Kegiatan	30
2.6	KEBIJAKAN	31
2.7	STRATEGI	31
2.8	PEMBIAYAAN	32
	LAMPIRAN TABEL	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamankan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (*Medium-Term Expenditure Framework*), penganggaran terpadu (*Unified Budget*), dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*). Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bersama dengan Menteri Keuangan menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 0142/M.PPN/06/2009 yang menetapkan pelaksanaan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) untuk pembangunan jangka menengah periode kedua, tahun 2010-2014.

Reformasi perencanaan dan penganggaran mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan, dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi. Program disusun secara hierarkis agar dapat menjelaskan hubungan logis antar prioritas perencanaan organisasi, program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), menetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Di samping itu, Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Diktum Kedua menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah, mulai dari

Kementerian/Lembaga, Eselon I dan Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Fungsi Renstra K/L sangat penting karena merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang meliputi Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga/Negara (RKA-KL). Renja K/L dan RKA-KL ini merupakan lampiran Nota Keuangan untuk mengantarkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disampaikan oleh Presiden RI dalam pidato Kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 16 Agustus setiap tahunnya. Sebagai turunan dari Renstra K/L, maka Renstra Sekretariat Jenderal ini juga memiliki peran dan fungsi yang tak kalah penting. Renstra Sekretariat Jenderal 2010-2014 ini memuat program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkup Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi manajemen koordinasi dan tugas teknis lainnya di lingkup Kementerian Pertanian secara tahunan dalam periode pembangunan tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 disusun sebagai acuan bagi Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal dalam menyusun Renstra Eselon II dan Rencana Kerja Tahunan sebagai bentuk fasilitasi pembangunan pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

I.2 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ /OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin pada Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
7. Koordinasi dan penyusunan prioritas kerjasama luar negeri di bidang pertanian;
8. Pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan informasi pertanian;
9. Pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari lima Biro dan tiga Pusat, yaitu :

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
3. Biro Hukum dan Informasi Publik;
4. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
5. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat;
6. Pusat Kerjasama Luar Negeri;
7. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
8. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN



I.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretariat Jenderal selama periode 2005-2009, melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005, dimana pelaksanaannya diwadahi dalam Program Penyelenggaraan Kepemimpinan dan Pemerintahan. Operasionalisasi dari pelaksanaan program tersebut dijabarkan kedalam tugas pokok dan fungsi masing-masing Biro/Pusat sebagai berikut.

I.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan pertanian;
- b. Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian;
- d. Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

I.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan budaya kerja;
- b. Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai;
- d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian.

I.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum dan Informasi Publik

Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
- b. Pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;
- c. Penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
- d. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik.

I.3.4. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Keuangan dan Perlengkapan

Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas : melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, serta arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
- b. Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian;
- c. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
- d. Pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian dan pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan.

I.3.5. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- c. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dan protokol;
- d. Pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.

I.3.6. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kerjasama Luar Negeri

Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas : melaksanakan penyelenggaraan kerjasama luar negeri di bidang pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama bilateral di bidang pertanian;

- b. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama regional di bidang pertanian;
- c. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama multilateral di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan urusan atase pertanian;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri.

I.3.7. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas : melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan informasi pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran;
- b. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian;
- c. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi non komoditas pertanian;
- d. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

I.3.8. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas : melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan rencana, program dan anggaran serta kerjasama;
- b. Pemberian pelayanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumber daya genetik tanaman;
- c. Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian;
- d. Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan, permohonan, pembatalan hak, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan, dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

I.4 URAIAN TUGAS SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada 8 kelompok uraian tugas yang akan dikembangkan oleh 8 unit Eselon-II yang berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal, yang mencakup kegiatan :

1. Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian.
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
3. Pembinaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertanian dan Koordinasi Pengelolaan Informasi Publik.
4. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Kementerian serta kearsipan Kementerian Pertanian.
5. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, hubungan antar lembaga dan protokol serta Pengembangan Hubungan Masyarakat.

6. Pengembangan Kerjasama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian Dalam Kerangka Bilateral, Regional, Multilateral.
7. Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian.
8. Pengembangan Pelayanan Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman serta Pelayanan Perizinan Pertanian.

I.4.1 Uraian Tugas Biro Perencanaan

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian ini dikelola oleh Biro Perencanaan yang terdiri dari empat bagian sebagai berikut :

1. Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah;
2. Bagian Penyusunan Anggaran;
3. Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
4. Bagian Pelaporan; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian :

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, program dan wilayah;
2. Koordinasi penyusunan dan pengelolaan anggaran;
3. Koordinasi pemantauan dan evaluasi;
4. Koordinasi pelaporan; dan
5. Koordinasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Indikator Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian :

1. Dokumen penyusunan kebijakan;
2. Dokumen penyusunan anggaran;
3. Laporan pemantauan dan evaluasi; dan
4. Laporan kinerja Kementerian Pertanian.

I.4.2 Uraian Tugas Biro Organisasi dan Kepegawaian

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian ini dikelola oleh Biro yang terdiri dari empat bagian sebagai berikut :

1. Bagian Organisasi;
2. Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
3. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
4. Bagian Mutasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian :

1. Koordinasi penataan organisasi;
2. Koordinasi penataan ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;
3. Koordinasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
4. Koordinasi mutasi kepegawaian; dan
5. Koordinasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Indikator Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian :

1. Dokumen penataan kelembagaan;
2. Laporan pembinaan jabatan fungsional;
3. Laporan pelayanan publik dan budaya kerja;
4. Laporan ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;
5. Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
6. Jumlah dokumen mutasi pegawai; dan
7. Laporan pembinaan SDM aparatur pertanian melalui organisasi kedinasan.

I.4.3 Uraian Tugas Biro Hukum dan Organisasi Publik

Kegiatan Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik ini dikelola oleh Biro yang terdiri dari empat bagian sebagai berikut :

1. Bagian Perundang-Undangan I;
2. Bagian Perundang-Undangan II;
3. Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum;
4. Bagian Pengelolaan Informasi Publik; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub kegiatan Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik :

1. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penelitian dan pengembangan, ketahanan pangan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian;
2. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan, karantina dan pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;
3. Koordinasi pelayanan perjanjian dan bantuan hukum; dan
4. Koordinasi pengembangan dan pengelolaan informasi publik.

Indikator Kegiatan Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik :

1. Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian;
2. Laporan kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita negara;
3. Jumlah laporan perjanjian dan layanan bantuan hukum; dan
4. Laporan layanan informasi publik bidang pertanian.

I.4.4 Uraian Tugas Biro Keuangan dan Perlengkapan

Kegiatan Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan Kearsipan Kementerian Pertanian ini dikelola oleh Biro yang terdiri dari empat bagian sebagai berikut :

1. Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
3. Bagian Perlengkapan;
4. Bagian Kearsipan dan Administrasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub kegiatan Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan Kearsipan Kementerian Pertanian :

1. Koordinasi pelaksanaan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak;
2. Koordinasi pelaksanaan akuntansi dan verifikasi;
3. Koordinasi pengelolaan perlengkapan; dan
4. Koordinasi pengelolaan kearsipan dan administrasi.

Indikator Kegiatan Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan Kearsipan Kementerian Pertanian :

1. Laporan penyelesaian kerugian negara, pelaksanaan anggaran dan realisasi pendapatan PNBPN;
2. Dokumen penetapan pejabat pengelola keuangan Kementerian Pertanian;
3. Laporan verifikasi dan keuangan Kementerian Pertanian;
4. Laporan penatausahaan, pemanfaatan dan penghapusan BMN, serta pengelolaan aset Kementerian Pertanian;
5. Laporan pelaksanaan penataan arsip, pembinaan fungsional arsiparis dan elektronisasi arsip; dan
6. Laporan pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal dan pelaksanaan kegiatan Biro.

I.4.5 Uraian Tugas Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtangaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian ini dikelola oleh Biro yang terdiri dari empat bagian sebagai berikut :

1. BagianTata Usaha;
2. Bagian Rumah Tangga;
3. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol;
4. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtangaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian :

1. Koordinasi ketatausahaan Kementerian Pertanian;
2. Koordinasi pengelolaan kerumahtangaan Kementerian Pertanian;
3. Koordinasi pengembangan hubungan antara lembaga dan protokol;
dan
4. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat.

Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtangaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian :

1. Laporan ketatausahaan Kementerian dan Pimpinan;
2. Laporan fasilitasi kerumahtangaan Kementerian Pertanian;
3. Laporan Hubungan Antar Lembaga, keprotokolan dan pelayanan pimpinan;
4. Laporan Pengelolaan Hubungan Masyarakat;
5. Laporan penyebarluasan informasi program pembangunan pertanian dan paket pemasyarakatan program pembangunan pertanian.

I.4.6 Uraian Tugas Pusat Kerjasama Luar Negeri

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral ini dikelola oleh Pusat yang terdiri dari empat bagian sebagai berikut :

1. Bidang Bilateral;
2. Bidang Regional;
3. Bidang Multilateral; dan
4. Sub Bagian Tata Usaha dan Atase Pertanian.

Sub kegiatan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral :

1. Koordinasi pengembangan kerjasama bilateral bidang pertanian;
2. Koordinasi pengembangan kerjasama regional bidang pertanian;
3. Koordinasi pengembangan kerjasama multilateral bidang pertanian; dan
4. Koordinasi tatusaha Pusat Kerjasama Luar Negeri dan pembinaan Atase Pertanian.

Indikator Kegiatan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral :

1. Dokumen pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama internasional dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral;
2. Dokumen prioritas kerjasama luar negeri bidang pertanian;
3. Jumlah Nota Kesepakatan kerjasama pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral;
4. Laporan pengembangan kerjasama luar negeri; dan
5. Laporan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri dan Atase Pertanian.

I.4.7 Uraian Tugas Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian ini dikelola oleh Pusat yang terdiri dari empat bagian sebagai berikut :

1. Bagian Umum;
2. Bidang Data Komoditas;
3. Bidang Data Non Komoditas;
4. Bidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian :

1. Koordinasi pengembangan data komoditas pertanian;
2. Koordinasi pengembangan data non komoditas;
3. Koordinasi pelayanan pengembangan sistem informasi pertanian; dan
4. Koordinasi administrasi Pusat Data dan Informasi Pertanian.

Indikator Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian :

1. Laporan data pertanian (hulu, *on-farm*, dan hilir);
2. Laporan analisis data pertanian;
3. Laporan pengembangan sistem dan teknologi informasi pertanian; dan
4. Petugas pengelola dan pengumpul data pertanian yang dilatih.

I.4.8 Uraian Tugas Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian ini dikelola oleh Pusat yang terdiri dari empat bagian sebagai berikut :

1. Bagian Umum;
2. Bidang Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian; dan
4. Bidang Pelayanan Hukum.

Sub kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian :

1. Koordinasi pelayanan perlindungan varietas tanaman;
2. Koordinasi pelayanan perizinan pertanian;
3. Koordinasi pelayanan hukum; dan
4. Koordinasi ketatausahaan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Indikator Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian :

1. Permohonan hak PVT (varietas);
2. Laporan pengujian varietas tanaman;
3. Sertifikat pendaftaran varietas dan SDG tanaman;
4. Sertifikat hak PVT;
5. Laporan pertimbangan hukum;
6. Jumlah surat izin bidang pertanian;
7. Rekomendasi teknis bidang pertanian; dan
8. Laporan pengelolaan administrasi dan dukungan manajemen lainnya Pusat Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

I.5 CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

Selama periode 2005-2009, Sekretariat Jenderal memperlihatkan kinerja yang cukup menggembirakan. Dari sisi anggaran, secara umum realisasi penyerapannya menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2008, Sekretariat Jenderal mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp 1,4 triliun, dimana realisasi anggarannya mencapai Rp 1,35 triliun atau 90,97 persen. Pada tahun 2009, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,57 triliun, realisasi anggaran sebesar Rp 1,48 triliun atau 94,15 persen. Di sisi lain, perhatian perlu diberikan kepada beberapa unit kerja yang pencapaian realisasi anggarannya masih di bawah 80 persen, seperti Biro Kerjasama Luar Negeri termasuk di dalamnya Atase Brussel, Atase Tokyo, Atase Washington, dan Atase Roma; Pusat Data dan Informasi; serta Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Hasil evaluasi kinerja pada sub program kerja pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Sub Program Kerja Pembinaan dan Koordinasi di bidang Perencanaan dan Ketatausahaan nilai capaian sarannya sebesar 100% dan sebagian besar dari kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai target yang ditentukan. Output yang dihasilkan antara lain buku Revitalisasi Pertanian, buku Database Pembangunan Pertanian, buku Draft Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014, dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dokumen RKA-KL, buku Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian, buku Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian, buku Pedoman Umum Bantuan Sosial (Bansos), Laporan Evaluasi Tahunan Kementerian Pertanian, Laporan Kinerja Kementerian Pertanian, Laporan bahan-bahan Pimpinan, buku Pedoman Tata Naskah, Pedoman Kearsipan, dukungan ketatausahaan, dan lain sebagainya;
2. Sub Program Kerja Pembinaan dan Koordinasi di bidang Organisasi dan Kepegawaian, nilai capaian sasaran sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan dapat berjalan dengan baik serta dapat mencapai target yang telah ditentukan. Beberapa capaian tersebut antara lain: penataan 3 unit Unit Pelaksana Teknis/UPT (jumlah UPT sesuai yang ditargetkan), pelayanan kesehatan untuk 14.694 orang, rekrutmen pegawai baru sebanyak 1.280 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terdiri dari tingkat pendidikan D3 sebanyak 256 orang, D4/S1 sebanyak 696 orang, S2 sebanyak 200 orang dan tenaga honorer sebanyak 376 orang. Sementara itu, telah pula dihasilkan draft usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian;
3. Sub Program Kerja Pembinaan dan Koordinasi di bidang Keuangan dan Perlengkapan, nilai capaian sasaran rata-rata sebesar 100 persen, yang menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatannya dapat diselesaikan dengan baik, meliputi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pelaksanaan urusan perbendaharaan, penatausahaan anggaran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP dan

TGR), verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan penataan aset-aset milik negara;

4. Sub Program Kerja Pembinaan dan Koordinasi di bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat, nilai capaian sasaran hampir mendekati 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan, yang mencakup legislasi (hukum) dan hubungan masyarakat, penyiapan produk-produk hukum di bidang pertanian yaitu dalam bentuk Peraturan dan Keputusan Menteri Pertanian serta pelayanan kerjasama antar lembaga dan fasilitasi konferensi pers. Sampai dengan tahun 2009 telah diterbitkan 4.126 buah produk hukum terbagi atas 61 dan 29 ditempatkan dalam berita negara dan 4.065 buah keputusan yang terkait dengan produk regulasi seperti Undang-Undang;
5. Sub Program Kerja Pembinaan dan Koordinasi di bidang Kerjasama Luar Negeri, nilai capaian sasaran rata-rata 100 persen dimana cakupannya seperti: kerjasama regional, penyelenggaraan kerjasama se-Asia Eropa, Timur Tengah, Amerika, Afrika, dan Pasifik, penyelenggaraan penerimaan kunjungan tamu pejabat tinggi negara mitra dan pejabat executive Badan Internasional, peningkatan kerjasama Bilateral, serta pelaksanaan dan partisipasi aktif dalam sidang-sidang internasional baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral;
6. Sub Program Pembinaan dan Koordinasi di bidang Data dan Informasi Pertanian, nilai capaian sasaran sebesar 100% dengan kegiatan antara lain: pengembangan statistik pertanian, pengembangan sistem informasi, pelatihan statistik dan komputer;
7. Sub Program Pembinaan dan Koordinasi di bidang Pembiayaan, nilai capaian sasaran mencapai 100 persen, yang mencakup: penyusunan kebijakan pembiayaan agribisnis, akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP);

8. Sub Program Pembinaan dan Koordinasi di bidang Perizinan dan Investasi, nilai capaian sasaran mencapai 100 persen. Pencapaian tersebut meliputi: penyusunan pedoman perizinan & investasi, penyusunan bahan promosi, penyusunan buku peluang dan potensi investasi pertanian, pengembangan jaringan sistem informasi pelayanan perizinan dan investasi, penyusunan Maximum Residue Limits (MRL) pestisida dan pemberian Batuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP);
9. Sub Program Pembinaan dan Koordinasi bidang Perlindungan Varietas Tanaman, nilai capaian sasaran sebesar 100 persen, yang menunjukkan bahwa semua kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik, mencakup: pembinaan SDM, penyediaan sarana dan prasarana PVT, pembangunan SDJI, pencatatan Daftar Umum dan penerbitan Berita Resmi PVT, penyiapan tata cara dan terlaksananya pelayanan permohonan hak PVT, pendaftaran varietas tanaman, pemeriksaan uji substansi dan pemberian sertifikat.

I.5.1. Capaian Kinerja perencanaan

Jumlah Dokumen Perencanaan pada periode tahun 2005-2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Buku Renstra Kementerian Pertanian 2005-2010 Edisi revisi;
2. Buku Revitalisasi Pertanian;
3. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja Tahunan/RKT);
4. Dokumen Perencanaan Anggaran Tahunan : Rancangan Pagu Indikatif, Pagu Sementara, Pagu Definitif serta Penerbitan DIPA dan revisinya (Rencana Kerja dan Anggaran/RKA);
5. Pertemuan nasional guna menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbangnas (Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pertanian) serta merancang kegiatan tahun berikutnya sebagai bahan Raker

- dengan Komisi IV DPR RI dan pembahasan RKA-KL dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Penyusunan SAKIP (menggambarkan kinerja Kementerian Pertanian) dan LAKIP (sebagai wujud akuntabilitas Kementerian Pertanian) guna menunjukkan kinerja dengan nilai-nilai yang semakin meningkat dan membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja;
 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan pertanian;
 8. Pelaksanaan sistem pengendalian internal yang ditingkatkan mulai dari penyusunan SOP dan pedoman-pedoman yang terkait dengan anggaran.

I.5.2. Capaian Kinerja Organisasi dan Kepegawaian

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian pada tahun 2009 berjumlah 1.174 orang yang tersebar di masing-masing Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai golongan I sebanyak 10 orang, golongan II sebanyak 222 orang, golongan III sebanyak 820 orang dan golongan IV sebanyak 122 orang;
2. Pegawai tingkat pendidikan SD s.d. SLTA sebanyak 548 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 55 orang, S1 sebanyak 401 orang, S2 sebanyak 155 orang dan S3 sebanyak 15 orang;
3. Pegawai umur kurang dari 30 tahun sebanyak 125 orang, umur antara 30-40 tahun sebanyak 303, umur antara 40-50 sebanyak 519 orang, dan umur lebih dari 50 tahun sebanyak 227 orang;
4. Pegawai berdasarkan jenis kelamin untuk laki-laki sebanyak 759 orang dan perempuan sebanyak 415 orang.

I.5.3. Capaian Kinerja Hukum dan Humas

Jumlah Produk Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian Pertanian pada periode tahun 2005-2010 berjumlah 11.347 buah dengan rincian sebagai berikut :

1. Produk Hukum berupa Undang-undang sebanyak 11 Undang-undang;
2. Produk Hukum berupa Peraturan Pemerintah sebanyak 20 Peraturan Pemerintah;
3. Produk Hukum berupa Peraturan Presiden sebanyak 17 Peraturan Presiden;
4. Produk Hukum berupa Keputusan Presiden sebanyak 4 Keputusan Presiden;
5. Produk Hukum berupa Instruksi Presiden sebanyak 11 Instruksi Presiden;
6. Produk Hukum berupa Peraturan Menteri Pertanian sebanyak 322 Peraturan Menteri Pertanian;
7. Produk Hukum berupa Keputusan Menteri Pertanian sebanyak 10.828 Keputusan Menteri Pertanian;
8. Produk Hukum berupa Instruksi Menteri Pertanian sebanyak 1 Instruksi Menteri Pertanian;
9. Produk Hukum berupa naskah Perjanjian sebanyak 119 Perjanjian;
10. Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri yang menyangkut masalah perdata sebanyak 8 buah laporan;
11. Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 5 buah;
12. Layanan Bantuan Hukum di Mahkamah Konstitusi sebanyak 1 buah;
13. Himpunan Peraturan/Keputusan Menteri Tahun berjalan yang dipilih berdasarkan atas manfaat dan relevansinya untuk disebarluaskan;
14. Kompedium hukum bidang pertanian dipilih berdasarkan masalah yang bersifat kebijakan sebagai tindak lanjut dari undang-undang sebanyak 15 Kompedium Hukum;

15. Penempatan dalam berita negara sebagai syahnya suatu peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kegiatan Analisis Publik Kementerian Pertanian pada periode tahun 2005-2010 berjumlah 50.379 jumlah berita tentang pertanian di media dengan rincian sebagai berikut :

1. Berita positif tentang pertanian dari media sebanyak 19.981 buah;
2. Berita netral tentang pertanian dari media sebanyak 16.658 buah;
3. Berita negatif tentang pertanian dari media sebanyak 14.310 buah.

I.5.4. Capaian Kinerja Keuangan dan Perlengkapan

Jumlah alokasi dana APBN Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2005-2010 berjumlah Rp 7,09 triliun untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang tersebar di masing-masing Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2005 pagu anggaran sebesar Rp 227,87 miliar dengan realisasi 76,42%;
2. Tahun 2006 pagu anggaran sebesar Rp 762,19 miliar dengan realisasi 91,79%;
3. Tahun 2007 pagu anggaran sebesar Rp 1,66 triliun dengan realisasi 83,66%;
4. Tahun 2008 pagu anggaran sebesar Rp 1,49 triliun dengan realisasi 91,71%;
5. Tahun 2009 pagu anggaran sebesar Rp 1,53 triliun dengan realisasi 88,10%;
6. Tahun 2010 pagu anggaran sebesar Rp 1,42 triliun dengan realisasi 89,70%.

Jumlah Aset dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal pada tahun 2010 berjumlah Rp 1,64 triliun yang tersebar di masing-masing Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dengan rincian sebagai berikut :

1. Aset berupa persediaan senilai Rp 327,07 juta;
2. Aset berupa tanah senilai Rp 1.05 triliun;
3. Aset berupa peralatan dan mesin senilai Rp 182,11 juta;
4. Aset berupa gedung dan bangunan senilai Rp 319,91 juta;
5. Aset berupa jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 8,81 juta;
6. Aset tetap lainnya senilai Rp 578 juta;
7. Aset tak berwujud senilai Rp 16,24 juta;
8. Aset lain-lain senilai Rp 66,31 juta.

I.5.5. Capaian Kinerja Kerjasama Luar Negeri

Jumlah Dokumen Kerjasama Internasional pada periode tahun 2005-2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. *Country Strategic Opportunities Program (COSOP)* yang merupakan kerangka program kerjasama dengan IFAD untuk periode 2009-2013;
2. *National Medium Term Priority Framework (NMTPF)* yang merupakan kerangka program kerjasama dengan berbagai lembaga pangan dan pertanian internasional di bawah PBB;
3. *Country Assistant Strategy (CAS)* yang merupakan kerangka program kerjasama dengan *Islamic Development Bank (IDB)* untuk periode 2007-2009. Saat ini sedang dilakukan proses penyusunan kerangka program kerjasama yang baru, yaitu *Member Country Partnership Strategy (MCPS)* untuk periode 2010-2014.

Jumlah Pendidikan, Pelatihan, Kursus Singkat dan Workshop/Seminar di Luar Negeri pada periode tahun 2005-2010 adalah sebanyak 7.508 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan berupa Training sebanyak 1.293 pegawai;
2. Kegiatan berupa Workshop sebanyak 1.187 pegawai;
3. Kegiatan berupa Pertemuan sebanyak 2.835 pegawai;
4. Kegiatan berupa Kunjungan Kerja sebanyak 2.037 pegawai;
5. Kegiatan berupa Pendidikan S2 sebanyak 58 pegawai;

6. Kegiatan berupa Pendidikan S3 sebanyak 98 pegawai.

I.5.6. Capaian Kinerja Data dan Informasi Pertanian

Jumlah Prestasi Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian pada periode tahun 2005-2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Launching SMS Center Kementerian Pertanian pada bulan Maret, dengan nomor: 0813 8 303 4444. SMS Center ini ditujukan meningkatkan layanan kepada masyarakat tentang informasi pertanian;
2. Merintis penerapan e-Procurement di Lingkup Kementerian, e-Procurement merupakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan fasilitas elektronik dalam usaha mendapatkan barang/jasa yang diperlukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/nondiskriminatif dan akuntabel.
3. Menerapkan penyelenggaraan pendaftaran CPNS secara online;
4. Mengikuti ajang e-Government Award tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Warta ekonomi, dengan mendapat Prestasi puncak menjadi yang terbaik 1 (pertama) untuk kategori Kementerian/ Kementerian;
5. Pengembangan metode pengukuran luas baku lahan sawah menggunakan GPS dilakukan dengan sasaran untuk mengembangkan metode pengukuran dan mensosialisasikannya kepada petugas lapang dalam rangka mendata luas baku sawah di 5 Provinsi;
6. Telah membangun Sistem e-Petani dalam rangka meningkatkan akses petani kepada berbagai informasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepada Petani.
7. Menyenggarakan Konferensi International Informatika Pertanian (AFITA/ Asia Federation on Information Technology Agriculture) kerjasama dengan IPB dan Himpunan Informatika Pertanian Indonesia (HIPI).

I.5.7. Capaian Kinerja Perlindungan Varietas Tanaman

Jumlah Hak PVT yang masuk dan proses pemberian Hak PVT pada periode tahun 2005-2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Permohonan hak PVT sebanyak 291 varietas
2. Jumlah Perlindungan sementara sebanyak 240 varietas
3. Jumlah Proses Uji BUSS sebanyak 196 varietas
4. Jumlah Penerbitan sertifikat hak PVT sebanyak 121 Varietas

Tugas Komisi PVT yang telah dilaksanakan pada periode tahun 2005-2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan sistem Pelayanan PVT;
2. Melakukan 26 kali sidang Komisi;
3. Memberikan rekomendasi pemberian Hak PVT sejumlah 121 varietas dan penolakan sejumlah 10 varietas;
4. Membahas dan mengesahkan panduan umum sejumlah satu dokumen, Panduan Prosedural Pengujian (PPP) sejumlah 5 dokumen dan Panduan Pelaksanaan Uji BUSS (PPU) sejumlah 54 species tanaman.

I.5.8. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Investasi

Jumlah Prestasi Pelayanan Perizinan dan Investasi Kementerian Pertanian pada periode tahun 2005-2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan Pedum, Juklak, Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP);
2. Pembahasan tindak lanjut kunjungan Presiden / CEO Scanoil dari Swedia terkait dengan rencana investasi sebesar US\$ 12.000.000.000 untuk komoditi Jarak Pagar di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat seluas 100.000 ha;
3. Penyaluran BLM-KIP yang ditransfer ke rekening usulan perorangan/petani sebesar Rp 17.879.706.309,- atau 6% dari realisasi, dan yang ditransfer secara kolektif melalui Bank Penyalur sebesar Rp

295.463.256.400,- atau 75,57% dengan jumlah nasabah sebanyak 40.387 nasabah;

4. Proses perizinan pestisida (surat uji mutu, rekomendasi, sertifikat, segel, surat keterangan dan izin percobaan);
5. Proses perizinan pendaftaran pupuk (nomor pendaftaran, uji mutu, uji efektivitas, surat keterangan dan rekomendasi);
6. Permohonan surat izin pemasukan dan pengeluaran benih (hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, ternak potong);
7. Permohonan surat izin usaha obat hewan, dan Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) karkas, daging dan jeroan;
8. Koordinasi dalam rangka pengembangan System Pelayanan Informasi dan Perizinan secara elektronik (SPIPISE) bersama dengan BKPM;
9. Penyusunan Pedoman Penanaman Modal Sektor Pertanian di Indonesia pada tanggal 28 – 29 Oktober 2009;
10. Pelaksanaan Agrinex Expo 2009;
11. Finalisasi Revisi Perpres No. 111 Tahun 2007;
12. Gelar potensi Investasi sektor pertanian di Jakarta Convention Center pada tanggal 27 Mei 2010.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PEMBIAYAAN 2010-2014

II.1 VISI KEMENTERIAN PERTANIAN

Visi Kementerian Pertanian 2010-2014 adalah : Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani.

II.2 VISI SEKRETARIAT JENDERAL

Visi Sekretariat Jenderal Kementerian 2010-2014 Pertanian adalah : Menjadikan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas serta Memberikan Pelayanan Prima.

II.3 MISI SEKRETARIAT JENDERAL

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Misi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian 2010-2014 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur Kementerian Pertanian dan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan pertanian;
3. Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Pertanian yang proporsional, efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan informasi publik;

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan perlengkapan serta kearsipan;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan antar lembaga dan Protokol serta hubungan masyarakat;
7. Menyusun rumusan kebijakan kerjasama luar negeri pembangunan pertanian dan mensosialisasikan kerjasama luar negeri bidang pertanian;
8. Meningkatkan kualitas data dan mengembangkan sistem informasi pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian;
9. Menyelenggarakan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas.

II.4 TUJUAN

Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal, maka tujuan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal periode 2010-2014 adalah menyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, tata penyelenggaraan dan tata kewenangan untuk mewujudkan Kementerian Pertanian sebagai organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

Tujuan Umum dari Sekretariat Jenderal tersebut akan diselenggarakan melalui:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian yang terpadu, berbasis kinerja dan dalam kerangka pembangunan jangka menengah;
2. Pengembangan organisasi yang sesuai dengan beban kerja (right sizing), dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, serta sumberdaya manusia aparatur pertanian yang berbasis kompetensi;
3. Penerbitan perangkat peraturan perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum bidang pertanian, serta pengelolaan informasi publik Kementerian Pertanian yang dapat melindungi dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pertanian;

4. Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan dan perangkat perlengkapan Kementerian Pertanian guna mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
5. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan antar lembaga dan protokoler serta pengembangan pelayanan hubungan masyarakat yang dapat mendukung peningkatan efektivitas kinerja organisasi;
6. Penyusunan kebijakan dan pengelolaan administrasi kerjasama luar negeri bidang pertanian yang melindungi kepentingan nasional serta terintegrasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan perekonomian global;
7. Pengembangan, penataan dan pengelolaan data dan sistem informasi pertanian yang akurat, konsisten, relevan, terkini dan tepat waktu, serta menerapkan teknologi dan sistem informasi modern;
8. Penyelenggaraan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas internasional, cepat, tepat, akurat dan akuntabel guna mendukung terwujudnya pertanian tangguh dan dinamis.

II.5 SASARAN

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

II.5.1 Sasaran Program

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan koordinasi pembinaan, kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi dan teknis lainnya.

II.5.2 Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya kualitas penyusunan dan dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib;
3. Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, dan informasi publik bidang pertanian;
4. Meningkatnya kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral;
5. Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, kerumahtanggaan, dan terlaksananya pelayanan pimpinan serta pengelolaan Hubungan Masyarakat yang akuntabel dan transparan;
7. **Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi pertanian;**
8. Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman, pendaftaran varietas & SDG tanaman, serta perizinan pertanian yang mudah, cepat, tepat, akurat dan akuntabel.

II.6 KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh adalah: membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan Kementerian Pertanian yang sesuai dengan asas “*clean government and good governance*”.

II.7 STRATEGI

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi semua pemangku kepentingan Pusat dan Daerah.
2. Meningkatkan kualitas organisasi, tatalaksana, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Pertanian.
3. Meningkatkan kualitas produk perundang-undangan dan bantuan hukum bidang pertanian, serta pengelolaan informasi publik dilakukan secara profesional.
4. Meningkatkan dan menertibkan sistem administrasi keuangan dan administrasi perlengkapan serta pengelolaan arsip Kementerian Pertanian.
5. Meningkatkan pengelolaan pelayanan administrasi, kerumahtanggaan, masyarakat dan pimpinan.
6. Meningkatkan dan membina pelaksanaan dan jaringan kerjasama luar negeri bidang pertanian melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
7. Meningkatkan penerapan Teknologi Informasi untuk pengembangan Sistem dan Jaringan Informasi Pertanian guna perolehan dan analisis data pertanian.
8. Meningkatkan sistem pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman dan perizinan pertanian melalui penguatan sistem pengelolaan PVTTP dan kepastian perlindungan hukum bagi pemegang hak PVT dan pemohon perizinan.

II.8 PEMBIAYAAN

Untuk periode 2010-2014, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pendanaan yang berasal dari APBN sebesar Rp. 7.724,64 milyar, dengan perincian sebagai berikut pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1

No	Periode	Unit Kerja	Anggaran (Rp milyar)
1.	2010	5 Biro dan 4 Pusat	1.417,41
2.	2011 - 2014	5 Biro dan 3 Pusat	6.307,23
	2010-2014	Total	7.724,64

Perincian anggaran lebih lanjut untuk masing-masing Biro dan Pusat selama periode 2010-2014 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2010

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN (RP JUTA)
1.	Biro Perencanaan	86,67
2.	Biro Keuangan dan Perlengkapan	134,57
3.	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	44,00
4.	Biro Kerjasama Luar Negeri	16,16
5.	Biro Organisasi dan Kepegawaian	45,24
6.	Pusat Perizinan dan Investasi	11,61
7.	Pusat Pembiayaan	1.017,38
8.	Pusat Data dan Informasi Pertanian	54,78
9.	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman	7,00
	TOTAL	1.417,41

Tabel 2.3 Kebutuhan Pembiayaan APBN 2011-2014 pada Sekretariat Jenderal

No	KEGIATAN	ALOKASI DANA (milyar rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	Total
1.	Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian	56,84	64,33	67,55	70,92	259,64
2.	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Kementerian serta Kearsipan Kementerian Pertanian	106,67	120,72	126,75	133,08	487,22
3.	Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik	12,25	13,86	14,55	15,27	55,93
4.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	902,83	1.021,72	1.072,81	1.126,45	4.123,81

No	KEGIATAN	ALOKASI DANA (milyar rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	Total
5.	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtangaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian	224,87	254,48	267,21	280,57	1.027,13
6.	Pengembangan Kerjasama Luar Negeri untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional, dan Multilateral	24,39	27,60	28,99	30,44	111,42
7.	Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian	36,00	40,74	42,77	44,92	164,43
8.	Pengembangan Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman dan Pelayanan Perizinan Pertanian	17,00	19,24	20,20	21,21	77,65
TOTAL		1.380,85	1.562,69	1.640,83	1.722,86	6.307,23

Program, kegiatan, indikator, target dan kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian selama periode 2010-2014 digambarkan secara lebih lengkap pada Tabel Lampiran 1.

Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Kementerian Pertanian

Kegiatan	Sasaran	Output		Target					Alokasi Dana (Rp Milyar)				
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan, kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi	Koordinasi dokumen perencanaan kebijakan, anggaran Kementerian Pertanian yang dapat diacu	Jumlah dokumen perencanaan kebijakan, anggaran Kementerian Pertanian yang dapat diacu	20	24	26	29	30	420.23	1,380.86	1,562.69	1,640.82	1,722.86
		Koordinasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	87	90	95	98	105					
		Koordinasi realisasi pendapatan PNBP dari target	Persentase realisasi pendapatan PNBP dari target	100%	100%	100%	100%	100%					
		Koordinasi meningkatnya proses penyelesaian kerugian negara	Persentase meningkatnya proses penyelesaian kerugian negara	20%	20%	20%	20%	20%					
		Koordinasi kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian (opini)	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian (opini)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP					
		Koordinasi penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN	Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN	100%	100%	100%	100%	100%					

Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Kementerian Pertanian

Kegiatan	Sasaran	Output		Target					Alokasi Dana (Rp Milyar)				
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Koordinasi peningkatan jumlah unit eselon I yang melaksanakan penataan kearsipan secara elektronik	Persentase peningkatan jumlah unit eselon I yang melaksanakan penataan kearsipan secara elektronik	20%	40%	60%	80%	100%					
		Koordinasi dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum	Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum	60%	65%	70%	70%	80%					
		Koordinasi pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan publik	Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan publik	50%	55%	60%	60%	70%					
		Koordinasi penataan kelembagaan, tatalaksana, serta perencanaan pengembangan dan mutasi pegawai	Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta perencanaan pengembangan dan mutasi pegawai	15	15	15	15	15					
		Koordinasi laporan penataan kelembagaan, tatalaksana, perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai serta reformasi birokrasi	Jumlah laporan penataan kelembagaan, tatalaksana, perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai serta reformasi birokrasi										
		Koordinasi pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian	Menurunnya persentase pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian	50%	45%	45%	40%	35%					
		Koordinasi kerjasama dengan lembaga di luar Kementerian Pertanian	Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar Kementerian Pertanian	3	4	5	6	7					

Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Kementerian Pertanian

Kegiatan	Sasaran	Output		Target					Alokasi Dana (Rp Milyar)				
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya pelayanan teknis pertanian terkait penyediaan data dan sistem informasi pertanian, pembiayaan pertanian, perijinan dan investasi pertanian, serta perlindungan varietas tanaman	Koordinasi realisasi kegiatan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional, multilateral maupun PBB	Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional, multilateral maupun PBB	19%	37%	56%	77%	100%					
		Koordinasi ketersediaan data serta layanan sistem informasi pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan terbaru dan akurat	Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan terbaru dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%					
		Koordinasi hak perlindungan varietas tanaman yang dikeluarkan	Jumlah sertifikat hak perlindungan varietas tanaman yang dikeluarkan	100	100	100	100	100					
		Koordinasi izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan	Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan	2,700	2,850	4,200	4,500	5,000					

Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Kementerian Pertanian

Kegiatan	Sasaran	Output		Target					Alokasi Dana (Rp Milyar)				
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian	Dokumen Perencanaan Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Kementerian Pertanian yang Berkualitas Baik	1 Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah	1 Dokumen penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah	21	22	25	27	30	86.67	56.84	64.33	67.55	70.92
		2 Koordinasi Penyusunan Anggaran	2 Dokumen penyusunan Anggaran	23	26	27	30	31					
		3 Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi	3 Laporan Pemantauan dan Evaluasi	25	28	30	31	32					
		4 Koordinasi Kinerja Kementerian Pertanian	4 Laporan Kinerja Kementan	150	155	158	159	160					

Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Kementerian Pertanian

Kegiatan	Sasaran	Output		Target					Alokasi Dana (Rp Milyar)				
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan Kearsipan Kementerian Pertanian	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Secara Akuntabel dan Transparan serta Pengelolaan Kearsipan Secara Tertib	1 Koordinasi Penyelesaian Kerugian Negara, Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan PNPB	1 Laporan Penyelesaian Kerugian Negara, Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan PNPB	3	3	3	3	3	142.80	106.67	120.72	126.75	133.08
		2 Koordinasi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kementerian Pertanian	2 Dokumen Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kementerian Pertanian	1	1	1	1	1					
		3 Koordinasi Verifikasi dan Keuangan Kementerian Pertanian	3 Laporan Verifikasi dan Keuangan Kementerian Pertanian	2	2	2	2	2					
		4 Koordinasi Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan BMN, Serta Pengelolaan Aset Kementerian Pertanian	4 Laporan Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan BMN, Serta Pengelolaan Aset Kementerian Pertanian	6	6	6	6	6					
		5 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Arsip, Pembinaan Fungsional Arsiparis dan Elektronisasi Arsip	5 Laporan Pelaksanaan Penataan Arsip, Pembinaan Fungsional Arsiparis dan Elektronisasi Arsip	3	3	3	3	3					
		6 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Sekretariat Jenderal	6 Laporan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Jenderal	2	2	2	2	2					

Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Kementerian Pertanian

Kegiatan	Sasaran	Output		Target					Alokasi Dana (Rp Milyar)				
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik	Meningkatnya Ketersediaan Produk Hukum dan Perundang-undangan, Pelayanan Bantuan Hukum serta Informasi Publik di Bidang Pertanian	1 Koordinasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian	1 Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian	5	5	5	5	5		12.25	13.86	14.55	15.27
		2 Koordinasi Kompodium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri dan Penempatan dalam Berita Negara	2 Laporan Kompodium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri dan Penempatan dalam Berita Negara	3	3	3	3	3					
		3 Koordinasi Perjanjian dan Layanan Bantuan Hukum	3 Jumlah Laporan Perjanjian dan Layanan Bantuan Hukum	2	2	2	2	2					
		4 Koordinasi Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian	4 Laporan Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian	4	4	4	4	4					

Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Kementerian Pertanian

Kegiatan	Sasaran	Output		Target					Alokasi Dana (Rp Miliar)				
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4 Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian yang Tertib serta Tercapainya Reformasi Birokrasi	1 Koordinasi Penataan Kelembagaan	1 Dokumen Penataan Kelembagaan	4	4	4	4	4	45.24	902.83	1,021.72	1,072.81	1,126.45
		2 Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional	2 Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional	3	3	3	3	3					
		3 Koordinasi Pelayanan Publik dan Budaya Kerja	3 Laporan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja	3	3	3	3	3					
		4 Koordinasi Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi	4 Koordinasi Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi	8	8	8	8	8					
		5 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	5 Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	19	19	19	19	19					
		6 Koordinasi Mutasi Pegawai	6 Dokumen Mutasi Pegawai	9	9	9	9	9					
		7 Koordinasi Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan	7 Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan	1	1	1	1	1					

Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Kementerian Pertanian

Kegiatan	Sasaran	Output		Target					Alokasi Dana (Rp Milyar)				
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtangaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Perlengkapan yang Akuntabel dan Transparan dan Terlaksananya Pemasarakatan Program Pembangunan Pertanian dan Komunikasi Pembangunan Pertanian	1 Koordinasi Ketatausahaan Kementerian dan Pimpinan	1 Laporan Ketatausahaan Kementerian dan Pimpinan	3	3	3	3	3	3.00	224.87	254.48	267.21	280.57
		2 Koordinasi Fasilitas Kerumahtangaan Kementerian Pertanian	2 Laporan Fasilitas Kerumahtangaan Kementerian Pertanian	3	3	3	3	3					
		3 Koordinasi Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Pertanian	3 Laporan Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Pertanian	4	4	4	4	4					
		4 Koordinasi Pemasarakatan Program Pembangunan Pertanian	4 Paket Pemasarakatan Program Pembangunan Pertanian	6	6	7	7	8					
		5 Koordinasi Hubungan Antar Lembaga	5 Laporan Hubungan Antar Lembaga	3	3	3	3	3					
		6 Koordinasi Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan	6 Laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan	2	2	2	2	2					

Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Kementerian Pertanian

Kegiatan	Sasaran	Output		Target					Alokasi Dana (Rp Milyar)				
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6 Pengembangan Kerjasama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral	Meningkatnya Kerjasama Luar Negeri di Bidang Pertanian Melalui Forum Bilateral, Regional dan Multilateral	1 Koordinasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional	1 Dokumen Pembinaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional	5	5	6	7	8	16.16	24.39	27.60	28.99	30.44
		2 Koordinasi Nota Kesepakatan kerjasama pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral, serta PBB untuk pangan dan pertanian	2 Laporan Nota Kesepakatan kerjasama pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral, serta PBB untuk pangan dan pertanian	10	11	12	13	14					

Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Kementerian Pertanian

Kegiatan	Sasaran	Output		Target					Alokasi Dana (Rp Milyar)				
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7 Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian	Meningkatnya kualitas data pertanian	1 Koordinasi data pertanian (hulu, <i>on-farm</i> dan hilir)	1 Laporan data pertanian (hulu, <i>on-farm</i> dan hilir)	28	15	20	20	20	112.00	36.00	40.74	42.77	44.92
		2 Koordinasi analisis data pertanian	2 Laporan analisis data pertanian	5	6	7	7	7					
		3 Laporan pengembangan sistem dan teknologi informasi pertanian	3 Laporan pengembangan sistem dan teknologi informasi pertanian	16	11	11	11	11					
		4 Koordinasi pengelola dan pengumpul data pertanian yang dilatih	4 Petugas pengelola dan pengumpul data pertanian yang dilatih	6,000	3,000	4,500	4,500	4,500					

Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Kementerian Pertanian

Kegiatan	Sasaran	Output		Target					Alokasi Dana (Rp Milyar)				
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8 Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	1 Koordinasi Hak PVT (Varietas)	1 Permohonan Hak PVT (Varietas)	30	32	35	37	39	8.00	17.00	19.24	20.20	21.21
		2 Koordinasi Pengujian Varietas Tanaman	2 Laporan Pengujian Varietas Tanaman	5	5	5	5	5					
		3 Koordinasi Varietas dan SDG	3 Sertifikat Varietas dan SDG	100	103	105	107	109					
		4 Koordinasi Hukum Hak PVT	4 Sertifikasi Hukum Hak PVT	26	29	32	35	37					
		5 Koordinasi Pertimbangan Hukum	5 Laporan Pertimbangan Hukum	4	4	4	4	4					
		6 Koordinasi Izin Bidang Pertanian	6 Jumlah Surat Izin Bidang Pertanian	0	1,000	2,000	2,000	2,300					
		7 Koordinasi Teknis Bidang Pertanian	7 Rekomendasi Teknis Bidang Pertanian	0	1,850	2,200	2,500	2,700					
		8 Koordinasi Pengelolaan Administrasi dan Dukungan Manajemen Lainnya Pusat Varietas Tanaman dan Perizinan dan Pertanian	8 Laporan Pengelolaan Administrasi dan Dukungan Manajemen Lainnya Pusat Varietas Tanaman dan Perizinan dan Pertanian	1	1	1	1	1					